

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang ini, sektor bisnis di Indonesia mulai berkembang. Tentu saja kebanyakan dari mereka masih memfokuskan tujuan utamanya pada pencarian keuntungan semata. Perusahaan atau organisasi lainnya menganggap bahwa sumbangsih kepada masyarakat cukup diberikan melalui nilai dalam penyediaan lapangan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan dengan produknya dan pembayaran pajak kepada negara. Tentu saja hal tersebut tidaklah cukup apabila perusahaan ingin bertahan dan berkembang untuk masa depannya karena masyarakat tidak hanya menuntut perusahaan menyediakan barang dan jasa saja tetapi juga pertanggungjawaban secara sosial dan lingkungan terhadap kehidupannya (Aini, 2011).

Menurut Gray *et al.* (1987) dalam Sembiring (2005) tumbuhnya kesadaran publik akan peran perusahaan di tengah masyarakat melahirkan kritik karena menciptakan masalah sosial, polusi, sumber daya, limbah, mutu produk, tingkat *safety* produk, serta hak dan status tenaga kerja. Tekanan dari berbagai pihak memaksa perusahaan untuk menerima tanggung jawab atas dampak aktivitas bisnisnya terhadap masyarakat. Sehingga perusahaan dihimbau untuk bertanggungjawab terhadap pihak yang lebih luas dari pada kelompok pemegang saham dan kreditur saja.

Di dalam akuntansi konvensional (*mainstream accounting*), pusat perhatian yang dilayani perusahaan adalah *stockholders* dan *bondholders* sedangkan pihak yang lain sering diabaikan. Dewasa ini tuntutan terhadap perusahaan semakin besar. Perusahaan diharapkan tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan pemilik modal (investor dan kreditor) tetapi juga karyawan, konsumen serta masyarakat. Perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap pihak-pihak di luar manajemen dan pemilik modal. Akan tetapi perusahaan kadangkala melalaikannya dengan alasan bahwa mereka tidak memberikan kontribusi terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini disebabkan hubungan perusahaan dengan lingkungannya bersifat *non reciprocal* yaitu transaksi antara keduanya tidak menimbulkan prestasi timbal balik (Anggraini, 2004).

Tanggung jawab sosial semakin mendapatkan perhatian oleh kalangan dunia usaha. Sejak era reformasi bergulir, masyarakat semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap dunia usaha. Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat tersebut memunculkan kesadaran baru terhadap perusahaan tentang pentingnya melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* (Daniri, 2008 dalam Ratnasari dan Prastiwi, 2010). Selain itu, dorongan perusahaan untuk melaksanakan CSR adalah karena adanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur perusahaan-perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-Undang mengenai pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sudah tiga kali mengalami pembaharuan. Pertama UU No. 4 Tahun 1984, UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009. UU No. 32 Tahun 2009 menjadi harapan baru mengenai keberlangsungan lingkungan hidup,

kelestariannya dan panduan hidup bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya khususnya terhadap kelestarian lingkungan hidup (Utami, 2012).

Seiring dengan adanya perkembangan CSR, perusahaan mulai menyadari untuk mengungkapkan sebuah laporan yang tidak hanya berpijak pada *single bottom line*, yaitu kondisi keuangan perusahaan saja tetapi berpijak pada *triple bottom line*, yaitu selain informasi keuangan juga menyediakan informasi sosial dan lingkungan, yang kemudian disebut *sustainability report*. *Sustainability report* ini disusun dengan pedoman (standar) *Global Reporting Initiative (GRI)* yang telah dikembangkan sejak tahun 1990 dan disusun tersendiri terpisah dari laporan keuangan atau laporan tahunan.

Sustainability Reports menurut *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* dapat didefinisikan sebagai laporan publik dimana perusahaan memberikan gambaran posisi dan aktivitas perusahaan pada aspek ekonomi, lingkungan dan sosial kepada *stakeholder* internal dan eksternalnya (WBCSD dalam Soelistyoningrum, 2011). Dengan demikian, *sustainability report* idealnya mengintegrasikan tiga bentuk laporan sebelumnya (keuangan, sosial dan lingkungan).

Menurut Chariri (2011) bahwa laporan keberlanjutan (*sustainability report*) kian menjadi tren dan kebutuhan bagi perusahaan progresif untuk menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial dan lingkungannya sekaligus kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) perusahaan. *Sustainability reporting* semakin mendapat perhatian dalam praktek bisnis global dan menjadi salah satu kriteria dalam menilai tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Para pemimpin perusahaan-

perusahaan dunia semakin menyadari bahwa pengungkapan laporan yang lebih komprehensif (tidak hanya sekedar laporan keuangan) akan mendukung strategi perusahaan. Pengungkapan *sustainability report* juga dapat meningkatkan kinerja keuangan dan membangun legitimasi perusahaan.

Penelitian ini untuk menguji kembali pengaruh karakteristik perusahaan dan *corporate governance* terhadap pengungkapan *sustainability report* karena terdapat ketidakkonsistenan dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Almilia (2008) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan mengungkapkan lebih banyak karena ingin menunjukkan kepada *public* dan *stakeholders*. Hasil penelitian Mardiyono (2012) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Pembuktian ini tidak sejalan dengan temuan Aulia (2010) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Perusahaan dengan kemampuan kinerja keuangan yang baik dapat memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Dalam kondisi demikian perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi memiliki kecenderungan untuk lebih banyak mengungkapkan informasi mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Burton dkk. (2000) dalam Almilia dan Retrinasari (2007) menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan suatu perusahaan. Kondisi keuangan yang kuat akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi sebagai instrumen untuk meyakinkan para

stakeholders. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Badjuri (2011) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara rasio likuiditas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Semakin besar suatu perusahaan akan semakin disoroti oleh para *stakeholders*. Dikaitkan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bahwa tingginya kesadaran perusahaan terhadap dampak-dampak yang telah ditimbulkan dari hasil operasi perusahaan sangatlah penting. Hal ini dengan tingginya kesadaran perusahaan dapat memberikan image yang baik dihadapan *stakeholders*. Selain itu perusahaan dapat memperoleh legitimasi dari para *stakeholder*. Oleh karena itu semakin besar suatu perusahaan cenderung memiliki kepentingan untuk mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih luas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan merupakan variabel dalam menentukan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pembuktian ini tidak sejalan dengan temuan Zaenudin (2007) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memengaruhi pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan.

Perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi memiliki kepercayaan untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada *stakeholders* dan masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak terjadinya konflik kepentingan antar manajer dan pemilik perusahaan, serta adanya keselarasan tujuan dalam mewujudkan pertumbuhan perusahaan secara berkesinambungan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amal (2011) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung

jawab sosial perusahaan. Pembuktian ini tidak sejalan dengan temuan Waryanto (2010) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi, dan manajemen agar tercipta keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan. Dikaitkan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, banyaknya jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan dapat memberikan kontrol dan monitoring terhadap manajemen atas aktivitas-aktivitas perusahaan termasuk dalam pengungkapan *sustainability report* untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulastini (2007) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris dapat memengaruhi manajemen dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Terzaghi (2012) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris dan *profile* memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pembuktian ini tidak sejalan dengan temuan Febriana (2009) yang menyebutkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan pada pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Artinya, banyak atau sedikitnya jumlah dewan komisaris tidak akan mempengaruhi kebijakan pengungkapan *corporate social responsibility*.

Komite audit merupakan komite yang ditunjuk oleh perusahaan yang memiliki tugas untuk memberikan pengawasan auditor. Keefektifan komite audit dalam menjalankan tugasnya melalui rapat-rapat yang dilakukan memberikan terciptanya pengawasan laporan dan pelaksanaan *corporate governance* perusahaan

yang baik. Hal ini menandakan meningkatnya kualitas komite audit dalam memahami kebutuhan *stakeholders*. Oleh karena itu melalui rapat-rapat yang dilakukan semakin mendorong manajemen dalam melakukan pengungkapan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryono dan Prastiwi (2011) yang menyebutkan bahwa jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit dapat membantu dan menjamin pengungkapan dan sistem pengendalian dapat berjalan dengan baik. Pembuktian ini tidak sejalan dengan temuan Widowati (2009) dalam Ratnasari dan Prastiwi (2010) yang menyatakan bahwa jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit tidak menjamin bahwa pelaksanaan monitoring terhadap manajemen untuk melakukan kecurangan akan berjalan efektif.

Salah satu upaya dewan direksi dalam mewujudkan GCG adalah efektifnya dewan direksi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengawasan atas aktivitas perusahaan. Semakin efektifnya kinerja dewan akan mampu mengungkapkan informasi yang lebih luas mengenai aktivitas perusahaan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Luthfia (2012) menunjukkan bahwa total aset, jumlah karyawan, rapat dewan direksi, dan keberadaan *governance committee* berpengaruh positif terhadap publikasi *sustainability report*. Pembuktian ini tidak sejalan dengan temuan Utomo (2012) yang menemukan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Berdasarkan latar belakang tersebut serta beberapa hasil penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGUNGKAPAN *SUSTAINABILITY REPORT*”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Suryono dan Prastiwi (2011). Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dibuat mengikuti saran dari penelitian terdahulu. Perbedaan terletak pada penambahan variabel dan pengukuran variabel. Selain itu, penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011. Pemilihan data tahun 2011 dikarenakan periode waktu tersebut adalah data terbaru pada saat penelitian ini dilakukan.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah karakteristik perusahaan yang diwakili oleh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial. Sedangkan *corporate governance* diwakili oleh ukuran dewan komisaris, komite audit, dan dewan direksi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*?

2. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*?
5. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*?
6. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*?
7. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris terhadap hal-hal tersebut, antara lain:

1. Untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.
2. Untuk menguji apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.
3. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.
4. Untuk menguji apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

5. Untuk menguji apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.
6. Untuk menguji apakah komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.
7. Untuk menguji apakah dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

E. Manfaat Penelitian

1. Bidang Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada perusahaan pentingnya praktek pengungkapan sosial dan lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pengungkapan sukarela khususnya pengungkapan sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan.

2. Bidang Praktik.

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan suatu gambaran yang *up to date* tentang praktek pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia, dan menguji beberapa penentu potensial dari pengungkapan sosial dan lingkungan pada laporan tahunan perusahaan di Indonesia.